



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 9 Juli 2018
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.45 WIB s.d 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2018 sampai dengan Bulan Mei 2018. 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2019 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
Ketua Rapat	: Drs. Anton Sukartono Suratno, MSi
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Sestama BMKG, Plt. Sestama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.45 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sestama BMKG, Plt. Sestama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS pada hari ini adalah:
 - 1) Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2018 sampai dengan Bulan Mei 2018;
 - 2) Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2019 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
3. Ketua Rapat mempersilakan Sestama BMKG, Plt. Sestama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Plt. Deputi Perencanaan Bapel-BPWS untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Bapel-BPWS mengenai capaian terhadap target pelaksanaan APBN TA 2018 sampai dengan Semester I. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Bapel-BPWS melakukan upaya untuk peningkatan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.
2. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Bapel-BPWS mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran dari Eselon I dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

NO.	BADAN/PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF TA 2019 (Sesuai SB Menkeu dan Kepala Bappenas)	PENYESUAIAN PAGU INDIKATIF TA 2019 (Hasil Trilateral Meeting)	KEKURANGAN (<i>Backlog</i>)
		A	B	C	D (C-A)
1.	BMKG	2.935.591.300	1.777.894.692	1.777.894.692	(1.157.696.608)
	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	847.300.000	514.268.976	362.450.661	(484.849.339)
	Pengembangan dan Pembinaan MKG	2.088.291.300	1.263.625.716	1.415.444.031	(672.847.269)
2.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	4.597.436.820	2.149.145.757	2.149.145.757	(2.448.291.063)
	Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	635.198.182	576.320.304	587.883.960	(47.314.222)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	335.115.897	156.659.453	145.095.797	(190.020.100)
	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	3.627.122.741	1.416.166.000	1.416.166.000	(2.210.956.741)
3.	Bapel-BPWS	368.857.642	218.231.445	218.231.445	(150.626.197)
	Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	27.294.745	27.294.745	27.294.745	-
	Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	341.562.897	190.936.700	190.936.700	(150.626.197)

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Bapel-BPWS akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan Pagu Kebutuhan TA 2019 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

3. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan Basarnas untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas sehubungan dengan program prioritas keselamatan publik dan infrastruktur melalui pengembangan sistem pemantauan gempa bumi dan peringatan dini tsunami serta peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana peralatan layanan informasi gempa bumi, cuaca maritim dan penerbangan di Indonesia, serta program prioritas pencarian dan pertolongan.

4. Komisi V DPR RI mendukung rencana BMKG yang akan melakukan pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang untuk memenuhi keperluan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengamatan BMKG sebelum pagu alokasi anggaran disetujui.
5. Komisi V DPR RI mendukung upaya BMKG untuk mengantisipasi kekurangan pembiayaan dengan mengupayakan pendanaan kreatif dan inovatif seperti kerjasama, *soft loan*, hibah dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha / *Public Private Partnership* (KPBU/PPP).
6. Sebagai tindaklanjut Rapat Kerja tanggal 5 Juni 2018, maka BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Bapel-BPWS bersedia untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan RKA-K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan saran dan pendapat Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

Jakarta, 9 Juli 2018

KETUA RAPAT,



ANTON SUKARTONO SURATTO

**Pit. DEPUTI PERENCANAAN
BAPEL-BPWS,**



AGUS WAHYUDI

**Pit. SESTAMA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,**



NUGROHO BUDI WIRYANTO

SESTAMA BMKG,



UNTUNG MERDIJANTO